

RENSTRA

2021-2026

**Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Sragen**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kami dapat Menyusun Rencana dan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen (Renstra) Tahun 2021- 2026, Renstra ini disusun sebagai perwujudan adanya komitmen serta kewajiban bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen untuk menyusun sebuah konsep perencanaan strategis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026 yang didalamnya mencakup Visi Misi Bupati terpilih periode 2021– 2026.

Evaluasi Renstra ini pada hakekatnya merupakan rangkaian proses perencanaan strategis yang merupakan rencana maupun program-program serta kegiatan-kegiatan pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen yang disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan tetap memperhatikan Program-program Bupati terpilih selama lima tahun mendatang, renstra ini disusun dengan mengkompilasi aspirasi dari bidang-bidang serta kesekretariatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.

Semoga Rencana Startegis (Renstra) ini bermanfaat dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana-rencana, program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen selama lima tahun mendatang dalam upaya peningkatan pelayanan dan konstribusi, untuk mewujudkan pemerintahan “*Good Governance and Clean Government*” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Sragen, 16 Maret 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sragen



DWIYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770310 199511 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing wilayahnya.

Dokumen RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen mengacu pada Perda RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif serta menjadi perangkat penting yang menjelaskan tolak ukur dalam mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang merupakan integrasi keahlian antara sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu mewujudkan tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1.2 Landasan Hukum

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen sebagai pengelola sumber-sumber Pendapatan dan Keuangan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020

tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten /Kota;
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64).

1.3 Maksud dan Tujuan

MAKSUD

Maksud penyusunan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Penjabaran upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen untuk memudahkan cara-cara penyusunan perencanaan strategis dengan memanfaatkan dan mempelajari peluang-peluang yang merupakan terobosan dalam Sistem Pembangunan Administrasi Negara sebagai dokumen perencanaan yang menjadikan tugas dan fungsi satuan kerja dan diharapkan dapat mewujudkan “*Good Governance*”. Perwujudan “*Good Governance*” merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintah dalam pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan, strategi serta keselarasan program dengan kegiatan sesuai sasaran bupati-wakil bupati terpilih yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2016- 2021.
3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Sragen di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026 adalah untuk **“Meningkatkan Persentase PAD serta pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien”**

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : URUSAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKPD

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional di bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen mempunyai tugas Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan program, anggaran dan evaluasi kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset dan jasa penunjang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi Administratif Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian; Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pengelolaan Protokol; Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat; Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

2.2 Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan

pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, yang di dalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan meliputi: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan Informasi serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.3 Kelompok Unsur Keuangan

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang keuangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang keuangan;

- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan meliputi:
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Koordinasi Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak

Mempunyai tugas Melaksanakan peyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengorganisasian pelaksanaan tugas, pematauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan Pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang pendaftaran dan pendataan pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pendaftaran dan pendataan pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pendaftaran dan pendataan pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran dan pendataan pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendaftaran dan pendataan pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Kelompok Unsur Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pendaftaran dan pendataan pajak;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pendaftaran dan pendataan pajak;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pendaftaran dan pendataan pajak;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendaftaran dan pendataan pajak, meliputi: Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3.2 Kelompok Unsur Pengembangan dan Penyuluhan Pajak

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pengembangan dan Penyuluhan Pajak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan dan Penyuluhan Pajak;

- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakann teknis operasional di bidang Pengembangan dan Penyuluhan Pajak;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pengembangan dan Penyuluhan Pajak;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, meliputi Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah (meliputi: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah); Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah; Penyediaan Sarana dan Prasaranan Pengelolaan Pajak Daerah; Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Penyuluhan Pajak;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3.3 Kelompok Unsur Penetapan Pajak

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penetapan Pajak, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penetapan pajak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penetapan pajak;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang penetapan pajak;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang penetapan pajak;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penetapan pajak, meliputi Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Penetapan Wajib Pajak Daerah (meliputi: Penyiapan bahan Penetapan 9 (Sembilan) Jenis Pajak Daerah; Pengelolaan dan Distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan pajak; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Kelompok Unsur Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, yang di dalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I;

- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, meliputi:
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan; Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

4.2 Kelompok Unsur Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administrative dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, yang di dalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, meliputi:

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan; Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;

- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

4.3 Kelompok Unsur Analisis dan Administrasi Anggaran

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administrative, pelayanan administrative dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis dan Administrasi Anggaran. yang di dalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Analisis dan Administrasi Anggaran;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Analisis dan Administrasi Anggaran;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Analisis dan Administrasi Anggaran;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Analisis dan Administrasi Anggaran;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang meliputi:

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Analisis dan Administrasi Anggaran; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Kelompok Unsur Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan meliputi:
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban; Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHPBPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah; Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Bahan Koordinasi Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

5.2 Kelompok Unsur Pelaporan Keuangan

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelaporan Keuangan, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pelaporan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelaporan Keuangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Pelaporan Keuangan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pelaporan Keuangan;

- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelaporan Keuangan meliputi:
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten; Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD; Koodinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelaporan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

5.3 Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan meliputi:
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah; Implementasi dan Pemeliharaan Ssitem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah; Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah; Penyusunan Neraca

Daerah; Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.1 Kelompok Unsur Perbendaharaan I

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perbendaharaan I, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perbendaharaan I;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perbendaharaan I;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Perbendaharaan I;

- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Perbendaharaan I;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perbendaharaan I meliputi:
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal; Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal; Pembinaan Penatausahaan Keuangan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal; Pengkajian dan Analisis Pengajuan SPP/SPM serta Pengelolaan administrasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal; Penyusunan ketentuan Batas akhir Pencairan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perbendaharaan I; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

6.2 Kelompok Unsur Perbendaharaan II

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perbendaharaan II, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perbendaharaan II;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perbendaharaan II;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Perbendaharaan II;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Perbendaharaan II;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perbendaharaan II meliputi:
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Belanja Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Transfer; Penatausahaan Pembiayaan Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Transfer); Pembinaan Penatausahaan Keuangan (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Transfer); Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; Pengelolaan Dana Bagi Hasil; Pengkajian dan Analisis Pengajuan SPP/SPm serta Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Transfer serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perbendaharaan II; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

6.3 Kelompok Unsur Pengelolaan Kas Daerah

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Kas Daerah, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Kas Daerah meliputi:
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah; Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank

dan Bukan Bank; Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas; Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D; Pengelolaan Dana Cadangan Daerah; Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Daerah; Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah; Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah; Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah; Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi; penyusunan Buku Kas Umum; Rekonsiliasi dan Inputing Laporan Dana Transfer; Evaluasi Penyerapan APBD; Penyiapan Bahan Keputusan Pengelola Keuangan; Penetapan Rekening Giro dan Kuasa BUD; Penetapan Bank Pengelola Kas Daerah; Penyusunan Laporan DTHRTH serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7.1 Kelompok Unsur Penagihan Pajak

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penagihan Pajak yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Penagihan Pajak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penagihan Pajak;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Penagihan Pajak;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Penagihan Pajak;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penagihan Pajak meliputi:
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah (meliputi: Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak; Penagihan Pajak; Pelayanan Pembayaran Pajak dan Mobil Keliling); Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Pengelolaan Aplikasi Penagihan Pajak; Penyelenggaraan Undian Pajak; Safari Pajak serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penagihan Pajak; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

7.2 Kelompok Unsur Penyelesaian Keberatan Pajak

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyelesaian Keberatan Pajak yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Penyelesaian Keberatan Pajak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penyelesaian Keberatan Pajak;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Penyelesaian Keberatan Pajak;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Penyelesaian Keberatan Pajak;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyelesaian Keberatan Pajak meliputi:
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (meliputi: Layanan Pengajuan Keberatan Penetapan Pajak Daerah, Penanganan Klaim PBB, Penanganan Banding Pajak); Pelaksanaan Bulan Panutan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyelesaian Keberatan Pajak; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

7.3 Kelompok Unsur Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (meliputi: Rekonsiliasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah; Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, Penyusunan Laporan Penerimaan dan Tunggalan Pajak Daerah); Pemberian Penghargaan terkait Pajak serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

8. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan

Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

8.1 Kelompok Unsur Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah meliputi:

Penyusunan Standar Harga; Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah; Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penatausahaan Barang Milik Daerah; Penilaian Barang Milik Daerah; Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelolaan Usulan dan Tindak Lanjut Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Penatausahaan Barang Persediaan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.

- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

8.2 Kelompok Unsur Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengamanan Barang Milik Daerah; Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (meliputi: Pengelolaan Usulan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Penyiapan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Pemeliharaan Aset Daerah; Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas; Penyiapan dan Pengelolaan Dokumen Pemindahtanganan Aset Daerah; Penyiapan Surat Izin Penghuni (SIP) Penggunaan Rumah Negara; Penyimpanan Dokumen Asli Kepemilikan Barang Milik Daerah; Pengelolaan Usulan dan Tindak Lanjut Pemusnahan/Penghapusan Barang Milik Daerah; Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah; Pengelolaan Dokumen Pemanfaatan Aset Daerah) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

8.3 Kelompok Unsur Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang didalamnya mempunyai fungsi/uraian tugas :

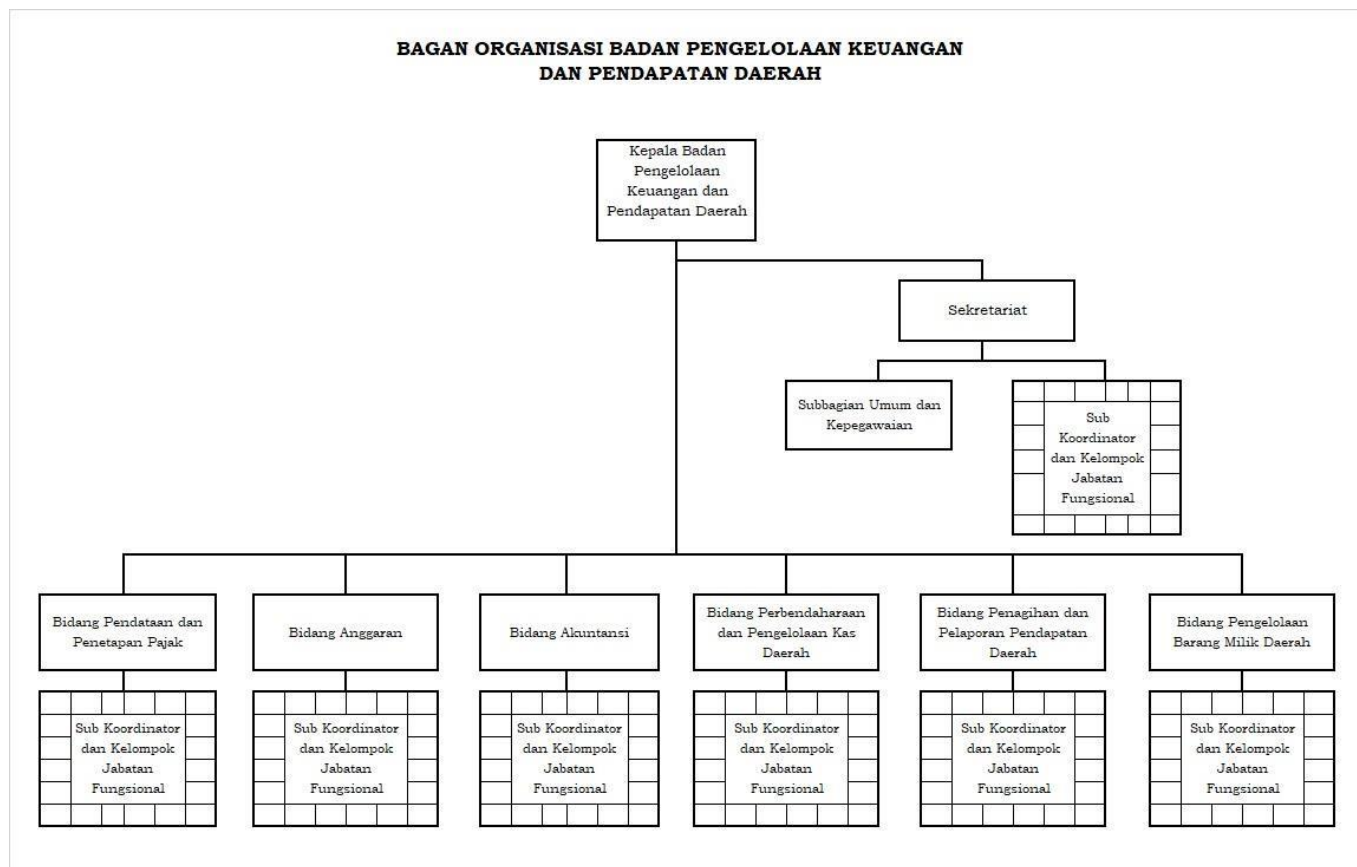
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah meliputi: Inventarisasi Barang Milik Daerah (meliputi: Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah; Regulasi/Appraisal Aset/Barang Daerah); Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (meliputi: Pelaksanaan Rekonsiliasi Dengan Pengurus Barang SKPD, Pelaksana Akuntansi SKPD, dan Bidang Akuntansi); Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (meliputi: Penghimpunan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; Penghimpunan dan Pencatatan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah); Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten (meliputi: Pembinaan Pengelolaan dan Peningkatan Manajaemen Aset Barang Milik Daerah) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen sebagaimana gambar 2.1

Gambar 2.1



Kepala Badan

Sekretariat, terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kelompok Unsur Keuangan

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak, terdiri dari:

- Kelompok Unsur Pendaftaran dan Pendataan Pajak
- Kelompok Unsur Pengembangan dan Penyuluhan Pajak
- Kelompok Unsur Penetapan Pajak

Bidang Anggaran terdiri dari:

- Kelompok Unsur Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I
- Kelompok Unsur Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I
- Kelompok Unsur Analisis dan Administrasi Anggaran

Bidang Akuntansi terdiri dari:

- Kelompok Unsur Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Kelompok Unsur Pelaporan Keuangan
- Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, terdiri dari:

- Kelompok Unsur Perbendaharaan I

- b. Kelompok Unsur Perbendaharaan II
- c. Kelompok Unsur Pengelolaan Kas Daerah

Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kelompok Unsur Penagihan Pajak
- b. Kelompok Unsur Penyelesaian Keberatan Pajak
- c. Kelompok Unsur Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

- a. Kelompok Unsur Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
- b. Kelompok Unsur Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- c. Kelompok Unsur Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

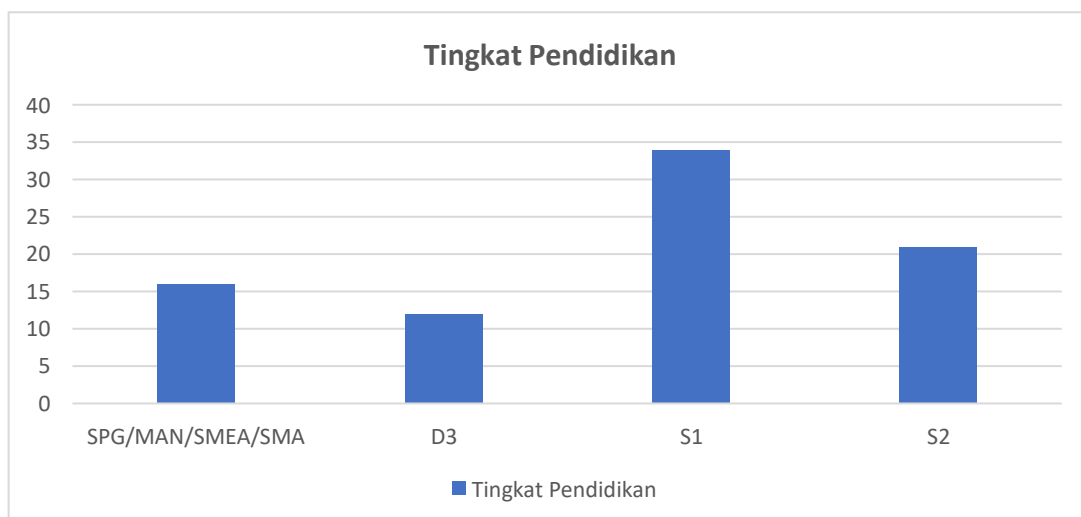
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sumberdaya OPD yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen adalah sumberdaya manusia yang merupakan penggerak pelaksanaan kegiatan sebanyak 83 orang terdiri dari 48 laki-laki dan 35 perempuan Pegawai Negeri serta 17 orang tenaga harian lepas dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Tingkat Pendidikan:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Sarjana (S2) Magister sebanyak | : 21 orang |
| 2. Sarjana (S1) sebanyak | : 34 orang |
| 3. Sarjana Muda/DIII sebanyak | : 12 orang |
| 4. SMA sebanyak | : 12 orang |
| 5. SMEA sebanyak | : 2 orang |
| 6. MAN sebanyak | : 1 orang |
| 7. SPG sebanyak | : 1 orang |



Menurut Pangkat dan Golongan :

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV	5	2	7
2	III	30	29	59
3	II	14	3	17
4	I	-	-	-
J U M L A H		49	34	83



Dari aspek kuantitas jumlah personil tersebut cukup memadai, namun untuk optimalisasi Sumber Daya Manusia perlu adanya peningkatan kualitas, baik melalui pendidikan formal dan non formal serta pada kursus/diklat tehnis fungsional pendukung.

Dibidang sarana dan prasarana meliputi Sarana Prasarana yang dijadikan sumber Penerimaan Pendapatan Daerah dan Sarana Prasarana Operasional penunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang masih perlu dioptimalkan penggunaannya. Sarana dan Prasarana yang dijadikan Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah meliputi Pajak hiburan, pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air tanah, pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Pajak Perolehan atas tanah dan atau bangunan, sumber Retribusi Daerah. Sedangkan Sarana Prasarana Operasional Kantor berupa Gedung Kantor beserta Perangkat keras dan lunaknya, Alat Transportasi Operasional Badan.

Dalam melaksanakan Kegiatan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen didukung dengan Anggaran Belanja meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Modal yang dianggarkan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan biaya kegiatan yang diperlukan pada tahun yang bersangkutan.

Untuk menunjang keberhasilan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen telah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan maupun Aset Daerah, pihak-pihak ketiga tersebut diantaranya PT. Taspen untuk pengelolaan gaji, BPD Jateng untuk masalah giro, deposito, pendapatan maupun gaji, serta BPKP Jateng dalam rangka pengelolaan SIMDA/Barang daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian Kinerja seluruh sasaran tahun 2016-2021 yang terukur meliputi Program :

1. Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Peningkatan disiplin aparatur.
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
5. Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Peningkatan dan Pengembangan pengelola keuangan daerah.
7. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
8. Peningkatan dan pelestarian dokumen arsip/daerah

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD
Kabupaten Sragen

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	PENDAPATAN				2.166.900.211.000	2.127.251.997.173	2.281.115.979.565	2.118.929.432.328	2.141.276.457.958	2.187.032.686.896	2.176.997.511.640	2.300.826.069.513	2.212.813.185.497	1.578.765.067.882	101%	102%	101%	104%	74%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH				401.875.430.000	327.508.593.000	339.720.770.005	309.617.040.945	391.963.733.958	404.569.404.722	334.303.284.344	368.325.799.601	394.453.117.572	353.168.575.234	101%	102%	108%	127%	90%
1	Pendapatan Pajak Daerah				71.301.450.000	78.673.000.000	90.025.000.000	79.578.074.600	91.000.000.000	82.767.722.185	85.863.439.123	99.967.537.333	111.442.618.797	89.813.630.888	116%	109%	111%	140%	99%
2	Hasil Retribusi Daerah				13.656.785.000	13.750.610.000	16.470.000.000	11.754.385.725	13.121.149.060	14.932.041.017	13.282.289.683	14.003.791.602	13.070.416.298	11.710.682.731	109%	97%	85%	111%	89%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				14.149.775.000	13.692.324.000	17.813.572.505	19.991.231.787	16.500.000.000	14.135.271.110	14.420.486.661	18.993.727.825	19.992.082.624	20.187.834.531	100%	105%	107%	100%	122%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				302.767.420.000	221.392.659.000	215.412.197.500	198.293.348.833	271.342.584.898	292.734.370.410	220.737.068.877	235.360.742.841	249.947.999.853	231.456.427.084	97%	100%	109%	126%	85%
II	DANA PERIMBANGAN				1.394.457.535.000	1.411.081.709.173	1.518.780.032.560	1.394.836.043.200	-	1.401.311.726.811	1.405.508.762.647	1.489.466.585.984	1.396.824.595.917	-	100%	100%	98%	100%	-
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak				38.001.261.000	32.990.632.000	28.942.707.000	31.443.289.929	-	34.396.772.271	27.428.743.938	21.040.338.635	30.630.429.867	-	91%	83%	73%	97%	-
2	Dana Alokasi Umum				1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	1.083.308.681.000	1.006.988.298.000	-	1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	1.083.308.681.000	991.204.614.000	-	100%	100%	100%	98%	-
3	Dana Alokasi Khusus				307.439.356.000	320.074.159.173	348.353.238.560	311.234.439.271	-	317.898.036.540	320.063.100.709	326.942.160.349	329.819.536.050	-	103%	100%	94%	106%	-
4	Dana Insentif Daerah				-	9.000.000.000	58.175.406.000	45.170.016.000	-	-	9.000.000.000	58.175.406.000	45.170.016.000	-	-	100%	100%	100%	-
III	PENDAPATAN TRANSFER				-	-	-	-	1.663.641.644.000	-	-	-	-	1.200.879.022.648	-	-	-	-	72%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				-	-	-	-	1.524.478.644.000	-	-	-	-	1.100.568.154.325	-	-	-	-	72%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				-	-	-	-	139.163.000.000	-	-	-	-	100.310.868.323	-	-	-	-	72%
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				370.567.246.000	388.661.695.000	422.615.177.000	414.476.348.183	85.671.080.000	381.151.555.363	437.185.464.649	443.033.683.928	421.535.472.008	24.717.470.000	103%	112%	105%	102%	29%
1	Pendapatan Hibah				6.219.817.000	80.291.200.000	78.840.600.000	84.039.000.000	85.671.080.000	7.333.549.877	79.431.452.542	82.373.040.000	88.997.410.000	24.717.470.000	118%	99%	104%	106%	29%
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				128.021.843.000	105.282.684.000	134.665.482.000	129.966.219.183	-	140.512.835.823	146.164.831.107	152.570.506.808	134.344.347.567	-	110%	139%	113%	103%	-
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				160.952.196.000	146.148.323.000	168.044.095.000	171.103.129.000	-	160.952.188.596	146.148.323.000	168.044.095.000	171.103.129.000	-	100%	100%	100%	100%	-
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				75.373.390.000	56.939.488.000	41.065.000.000	29.368.000.000	-	72.352.981.067	65.440.858.000	40.046.042.120	27.090.585.441	-	96%	115%	98%	92%	-
B	BELANJA				2.351.405.637.000	2.453.519.886.969	2.448.695.552.538	2.385.213.470.690	2.481.286.715.332	2.202.045.180.704	2.236.802.757.132	2.092.140.283.903	2.130.438.476.217	1.342.712.019.480	94%	91%	85%	89%	54%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1.449.901.102.000	1.405.205.102.703	1.630.676.936.094	1.543.100.488.890	1.632.828.445.933	1.380.283.071.980	1.323.969.992.812	1.338.302.483.399	1.331.372.257.994	960.752.878.614	95%	94%	82%	86%	59%
1	Belanja Pegawai				953.259.506.000	951.251.202.152	1.157.217.823.850	987.694.818.875	1.198.787.339.845	909.177.403.426	887.672.612.900	882.903.955.568	845.810.381.163	769.333.807.548	95%	93%	76%	86%	64%
2	Belanja Bunga				-	10.000.000.000	12.035.000.000	3.800.000.000	71.091.457.084	-	1.599.943.821	11.807.951.070	4.636.738.547	42.848.429.142	-	16%	98%	122%	60%
3	Belanja Hibah				58.803.098.000	60.144.597.000	52.669.100.000	89.189.513.442	11.217.500.000	40.836.398.000	57.262.561.040	48.993.049.480	86.512.829.442	8.465.000.000	69%	95%	93%	97%	75%
4	Belanja Bantuan Sosial				25.566.000.000	15.297.500.000	32.160.019.000	9.011.500.000	9.850.000.000	23.692.000.000	14.099.300.000	26.921.730.000	8.930.200.000	18.326.000	93%	92%	84%	99%	0%
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				8.075.549.000	8.076.549.000	11.169.000.000	4.770.000.000	4.500.000.000	7.678.827.458	7.617.748.600	9.217.905.650	4.548.068.600	968.438.500	95%	94%	83%	95%	22%
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				399.335.911.000	357.898.226.551	364.286.330.600	344.371.309.000	337.382.149.000	398.898.443.096	355.139.706.451	358.446.891.631	341.220.979.000	139.118.877.424	100%	99%	98%	99%	41%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	Belanja Tidak Terduga				4.861.038.000	2.537.028.000	1.139.662.644	104.263.347.573		-	578.120.000	11.000.000	39.713.061.242			23%	1%	38%	-
II	BELANJA LANGSUNG				901.504.535.000	1.048.314.784.266	818.018.616.444	842.112.981.800	848.458.269.399	821.762.108.724	912.832.764.320	753.837.800.504	799.066.218.223	381.959.140.866	91%	87%	92%	95%	-
1	Belanja Pegawai				97.258.527.000	99.689.416.772	88.426.773.666	119.255.861.160		92.740.733.329	90.768.720.038	81.206.477.833	109.438.642.427		95%	91%	92%	92%	-
2	Belanja Barang dan Jasa				419.448.514.000	448.140.303.863	444.095.199.935	444.924.897.927	585.514.221.208	379.501.632.370	393.845.190.625	423.304.936.617	421.120.115.989	304.799.508.510	90%	88%	95%	95%	52%
3	Belanja Modal				384.797.494.000	500.485.063.631	285.496.642.843	277.932.222.713	262.944.048.190	349.519.743.025	428.218.853.657	249.326.386.054	268.507.459.807	77.159.632.356	91%	86%	87%	97%	29%
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				206.837.685.000	376.825.139.465	277.929.572.973	376.284.038.362	342.587.257.374	206.837.633.273	359.006.818.465	277.929.112.252	376.284.038.362	342.587.257.374	100%	95%	100%	100%	100%
D	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				15.000.000.000	45.935.575.000	110.350.000.000	110.000.000.000	2.577.000.000	15.000.000.000	21.272.000.000	110.330.859.500	116.080.879.500	0	100%	46%	100%	106%	0%

Tabel 2.2
PROYEKSI PENDAPATAN KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021 - 2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN	1,48	2.104,054	2.161,078	2.167,137	2.174,689	2.183,678	2.194,051	0,11
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,01	307,612	351,772	361,241	371,061	381,250	391,834	1,19
Pendapatan Pajak Daerah	14,18	75,070	90,000	92,961	96,019	99,178	102,441	2,08
Hasil Retribusi Daerah	-4,42	12,653	16,542	18,145	19,904	21,832	23,948	8,83
Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,83	16,500	16,500	16,830	17,167	17,510	17,860	0,19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,35	203,389	228,730	233,305	237,971	242,730	247,585	1,45
PENDAPATAN TRANSFER	-5,23	1.712,403	1.702,753	1.699,343	1.697,075	1.695,875	1.695,664	-1,04
Transfer Pemerintah Pusat-Dana	1,21	1.572,945	1.543,295	1.552,290	1.561,401	1.570,639	1.580,003	0,28
Perimbangan								
Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	-3,45	26,627	28,470	27,62	26,788	25,984	25,204	-3,48
Dana Alokasi Umum	-1,75	1.017,058	984,485	994,33	1.004,27	1.014,32	1.024,46	0,22
Dana Alokasi Khusus	-0,27	325,820	333,237	333,240	333,240	333,240	333,240	0,11
Dana Insentif Daerah		28,074	14,431	14,430	14,43	14,43	14,43	-0,83
Dana Desa	8,82	175,366	182,672	182,67	182,67	182,67	182,67	2,21
Transfer Pemerintah Provinsi	-11,68	139,458	159,458	147,053	135,674	125,236	115,661	-5,30
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	3,56	130,000	150,000	137,595	126,216	115,778	106,203	-2,48
Bantuan Keuangan Provinsi	-26,91	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	-5,72

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	245,01	84,039	106,553	106,553	106,553	106,553	106,553	29,53
Pendapatan Hibah	245,01	84,039	106,553	106,553	106,553	106,553	106,553	29,53

Tabel 2.3
PROYEKSI BELANJA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 - 2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
BELANJA	0,26	2.271,547	2.374,166	2.406,718	2.283,278	2.288,222	2.298,595	0,29
BELANJA OPERASI		1.735,724	1.731,188	1.723,444	1.762,853	1.768,245	1.782,497	0,54
Belanja Pegawai	18,31	1.183,307	1.139,545	1.124,844	1.117,641	1.110,510	1.103,450	-1,38
Belanja Barang dan Jasa	8,56	484,670	523,525	528,761	503,203	520,747	544,712	2,45
Belanja Bunga			0,937	3,913	2,314	0	0	138,37
Belanja Hibah		56,762	58,303	57,137	130,994	128,374	125,807	25,2
Belanja Bantuan Sosial	15,15	10,985	8,878	8,789	8,701	8,614	8,528	-4,64
BELANJA MODAL	-1,04	190,923	292,407	342,89	189,923	199,060	204,478	6,67
BELANJA TAK TERDUGA	23,39	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	2,00
BELANJA TRANSFER		334,900	339,571	329,384	319,502	309,917	300,62	-2,12

Tabel 2.4
PROYEKSI PEMBIAYAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 - 2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN	-27,730	167,493	213,088	239,581	108,589	104,544	104,544	-3,75%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-7,850	167,493	251,717	326,273	183,268	114,544	114,544	5,74%
Penggunaan SiLPA	244,599	167,493	205,467	212,523	183,268	114,544	114,544	-11,96%

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
Pinjaman kepada Pihak ketiga			46,250	113,750	0,000	0,000	0,000	145,95%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	160,700	0,000	38,629	86,692	74,679	10,000	10,000	10,06%
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	17,487	0,000	25,000	10,000	5,000	10,000	10,000	-2,50%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	66,421	0,000	13,629	76,692	69,679	0,000	0,000	226,78%

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKPD
Kabupaten Sragen

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		20.203.783.000	19.637.906.000	22.589.483.000	23.855.310.200	16.420.591.937	17.194.162.061	19.313.956.845	21.970.145.724								
Penyediaan jasa surat- menyurat	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	2.490.000	4.500.000	4.500.000	4.998.000	4.980.000	4.500.000	100	100	100	100	100	14	14
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	18.700.000.000	18.650.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	21.500.000.000	15.046.328.831	15.735.312.780	17.773.969.116	19.572.635.252	15.046.328.831	74	57	85	87	80	335	342
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	349.943.000	424.943.000	379.942.000	405.276.000	0	294.102.833	365.169.245	318.157.146	309.884.847	0	60	97	98	97	84	7	15
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.000.000	25.000.000	25.000.000	125.700.000	127.845.000	18.482.900	24.820.225	24.956.300	40.252.750	115.228.575	28	47	98	22	46	-20	-12
Penyediaan jasa administrasi keuangan	170.100.000	200.000.000	200.000.000	1.122.392.000	981.777.700	160.500.000	185.600.000	178.650.000	1.120.824.000	160.500.000	97	97	88	82	94	-25	-25
Penyediaan jasa kebersihan kantor	56.200.000	57.000.000	69.282.000	66.139.000	76.418.500	56.200.000	56.998.000	69.282.000	66.138.500	56.200.000	100	100	100	88	100	70	40
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	82.000.000	82.000.000	80.000.000	56.000.000	68.500.000	42.417.460	76.612.500	79.973.200	56.000.000	42.417.460	100	100	96	70	52	30	14
Penyediaan alat tulis kantor	81.000.000	81.000.000	85.000.000	59.500.000	99.000.000	81.000.000	81.000.000	85.000.000	59.500.000	81.000.000	100	36	100	100	100	14	14

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000	35.000.000	34.000.000	24.500.000	24.500.000	35.000.000	35.000.000	33.957.800	23.492.000	35.000.000	100	21	100	100	100	20	20
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.562.800	4.996.500	4.990.000	5.000.000	7.562.800	100	24 51	100	100	95	18	18
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	363.978.000	191.000.000	177.050.000	177.710.000	643.850.000	357.333.000	186.175.000	171.170.000	170.380.000	357.333.000	100	13	94	88	98	25	24
Penyediaan peralatan rumah tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.200.000	2.440.000	1.920.000	3.457.510	3.500.000	2.440.000	100	99	100	56	70	24	15
Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000	75.000.000	109.980.000	136.500.000	109.999.000	57.768.000	74.990.000	103.640.000	136.457.000	57.768.000	100	25 2	97	84	77	18	9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	190.000.000	291.840.000	370.000.000	306.500.000	113.000.000	184.456.113	289.067.811	368.935.773	306.383.875	184.456.113	100	94	61	99	97	20	19.71
Penyediaan Jasa Pengemudi	0	0	37.129.000	38.369.000	40.324.000	0	0	37.128.000	37.887.000								
Penyediaan jasa pengamanan	72.500.000	75.000.000	57.023.000	57.397.000	60.406.000	72.500.000	72.000.000	55.692.000	56.830.500	72.500.000	0	0	0	100	100	26.92	26.92
Penyediaan jasa perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jaringan listrik (tambah daya listrik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		432.400.000	355.000.000	648.995.000	725.585.000	551.906.800	398.288.777	327.841.000	509.030.201	680.756.928							
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	385.000.000	0	0	300.000.000	0	347.845.500	0	0	202.060.000	0	99	97	97	859	90	-17.38	-18.82
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	99	0	0	-67.47	-66.80
Pengadaan mebeleur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	99	0	0	-98.97	-98.96
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000	235.000.000	170.000.000	132.000.000	501.940.000	66.980.000	234.030.600	169.594.800	132.000.000	499.230.000	99	97	97	81	90	16.47	13.86
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	197.400.000	197.400.000	185.000.000	216.995.000	223.645.000	137.081.300	164.258.177	158.246.200	174.970.201	181.526.928	100	29	100	81	89	11.28	4.77
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	87	65	69	115.44	115.44
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	-78.40	-78.40
Program peningkatan disiplin aparatur		0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		225.000.000	225.000.000	15.000.000	7.478.000	132.384.875	192.622.060	192.184.175	12.524.449	7.478.000							
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	0	0	0	1.653.875	18,904,560	0	0	0	59	60	77	22	7	0	-35.43
Bimtek pengelolaan barang daerah	150.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	130.731.000	173,717,500	178.843.000	0	0	0	0	0	81	87	24.69	-21.82
Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0
Sosialisasi pendaerahan PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Pengembangan sumber daya manusia	0	0	25.000.000	15.000.000	7.478.000	0	0	13.341.175	12.524.449	7.478.000							
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		17.500.000	17.500.000	15.000.000	0	17.500.000	17.234.000	17.499.900	15.000.000	0							
Penyusunan pelaporan keuangan	17.500.000	17.500.000	17.500.000	15.000.000	0	17.500.000	17.234.000	17.499.900	15.000.000	0	0	100	100	99	100	9.89	9.89
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		7.384.299.000	8.748.408.300	9.765.312.000	8.042.148.346			7.782.383.098	8.938.189.855	7.695.298.890							
Penyusunan standar satuan harga	53.240.000	93.240.000	55.000.000	155.366.000	89.459.500	38.847.500	84,694,000	53,786,000	150.670.500	87,964,500	0	0	100	100	100	21.81	21.67
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	60.380.000	73.673.000	55.850.000	55.000.000	37.500.000	39.925.500	64,334,000	45,284,000	150,670,500	34,700,000	79	93	74	77	85	18.05	19.81
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	200.611.000	334.721.000	732.888.000	712.628.000	957.500.000	169.757.000	201,889,000	703,533,000	53,375,000	956,636,085	66	50	81	72	84	7.88	13.19
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	150.495.000	150.495.000	134.875.000	110.623.000	210.747.000	126.413.000	147,528,363	129,081,828	707,330,420	210,416,900	88	88	93	91	94	29.75	31.61
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	220.654.000	204.864.000	216.467.000	214.173.000	207.600.000	207.320.500	199,819,762	207,376,500	109,006,351	207,140,300	114	89	88	88	95	10.49	12.35
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang	140.000.000	139.013.000	159.572.000	120.661.000	136.800.000	132.608.500	132,528,186	144,127,945	211,480,000	136,474,300	94	73	76	87	71	37.58s	30.04

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penjabaran Perubahan APBD																	
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	172.550.000	241.395.000	145.460.000	217.000.000	114.753.546	122.320.000	199,502,000	126,760,467	117,701,115	107,998,546	82	68	73	65	65	0.96	11.03
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	138.550.000	155.600.000	144.200.000	145.000.000	81.233.000	90.455.471	120,288,860	121,457,007	183,863,582	77,965,000	39	41	51	30	50	0.96	5.89
Penyusunan Neraca Daerah dan Laporan Semesteran	155.460.000	155.460.000	117.090.000	123.000.000	94.495.500	77.542.558	86,129,993	90,164,300	127,222,769	90,955,500	0	0	100	83	0	-20.69	-27.66
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	0	0	281.610.000	0	0	0	0	144,661,000	0	0	63	0	0	0	0	0	0
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	396.415.000	264.250.000	170.000.000	135.649.000	171.789.000	369.846.590	211,508,381	156,098,552	117,903,000	165,622,500	50	75	67	64	93	-2.24	10.77
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000	22.188.000	32.567.500	21.690.500	25,989,000	29,463,000	21,003,000	32,567,500	88	35	71	45	91	19.04	19.97
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	111.268.000	121.685.000	309.875.000	239.719.000	121.769.500	104.122.390	81,534,600	305,870,724	237,738,700	121,644,000	91	95	79	83	72	24.57	19.09
Pensertifikatan Tanah Milik Pemda	205.875.000	205.875.000	157.250.000	129.471.000	250.990.000	144.439.400	149,172,000	152,146,500	127,551,000	136,647,080	98	100	100	100	94	27.52	26.42
Penelaahan RKA dan DPPA	51.770.000	0	37.390.000	16.975.000	0	33.976.500	0	24,344,000	16,296,500	0	96	87	0	0	0	-3.31	-7.64
Penyusunan Instruksi Anggaran	38.876.000	38.876.000	38.844.000	30.826.000	0	37.273.500	36,890,000	37,654,000	29,944,500	0	83	87	96	97	70	-3.19	-6.29
Pembuatan Laporan Kas Umum Daerah	97.500.000	97.500.000	129.500.000	115.380.000	79.560.000	97.500.000	97,500,000	112,650,250	115,052,000	76,213,000	95	96	89	68	66	2.27	0.87
Penelaahaan SPMU dan Penerbitan SP2D Belanja Langsung	120.300.000	120.300.000	137.000.000	261.202.000	111.545.000	120.300.000	120,180,000	136,998,000	260,595,000	105,795,000	91	60	76	95	87	2.85	2.11
Komputerisasi Daftar gaji PNS	165.000.000	191.500.000	190.238.000	200.380.000	90.000.000	162.722.500	190,491,350	188,008,690	200,267,500	89,389,000	100	100	100	100	100	20.21	20.29
Verifikasi data potensi pajak dan redistribusi daerah	18.140.000	50.000.000	0	118.341.000	82.750.000	6.101.250	48,869,980	0	117.813.450	82,749,800	100	97	100	96	100	6.36	0.64

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak Daerah	269.257.000	249.789.000	289.086.000	154.946.000	86.727.000	236.525.940	172,326,950	277.648.000	146.115.000	83,789,500	99	94	96	85	99	7.02	6.88
Pembuatan Panggung Reklame	137.125.000	0	0	0	0	136.675.000	0	0	0	0	100	99	72	45	34	-9.57	-27.27
Monitoring, evaluasi, estribusi pajak pendapatan lain -lain	21.700.000	21.700.000	0	0	0	17.699.830	20,480,000	0	0	0	0	90	95	86	88	2.95	2.33
Sarana pemungutan PBB	91.101.000	70.276.000	0	0	0	90.253.500	69,448,500	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Pemberian Biaya penyampaian SPPT dan Penghargaan bagi Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang lunas PBB tepat waktu	2.189.610.000	1.989.610.000	2.539.350.000	1.317.010.000	948.000.000	1.899.576.994	1,721,793,660	2.183.189.935	1.203.804.900	941.013.362	98	100	97	0	0	41.59	40.97
Monitoring penyuluhan dan verifikasi penerimaan PBB	127.410.000	127.410.000	0	0	0	119.448.250	113,832,000	0	0	0	100	96	73	45	82	3.81	-0.37
Bulan panutan pelunasan PBB	170.323.000	170.323.000	171.483.000	147.132.000	131.600.000	169.423.000	169,423,000	170,283,000	145.957.000	130,070,000	0	55	0	0	0	0	0
Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan	50.000.000	50.000.000	60.000.000	60.000.000	45.640.000	50.000.000	49,276,000	59,787,000	59,742,000	45,640,000	0	100	100	0	0	0.84	0.84
Penyediaan Formulir Teknis SPPT. STTS. DHKP. Formulir-formulir Pelayanan PBB	395.772.000	407.772.000	395.772.000	502.787.000	498.861.500	390.852.900	402,066,000	392,430,200	500,100,500	498,861,450		98	99	98	99	-24.26	-24.08
Pemeliharaan data PBB dengan pola SISMIOP	114.016.000	179.016.000	122.550.000	150.786.000	99.268.000	107.630.000	176,922,000	120.624.900	137.676.000	99.267.700	0	0	92	0	0	0	0
Intensifikasi pengelolaan BPHTB	112.840.000	112.840.000	0	0	0	99.374.250	101,148,500	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarpras Hardware dan Software Pemungutan PBB	171.644.000	189.696.000	235.831.000	251.431.000	394.919.000	169.724.000	187,920,000	235,070,000	251,430,900	394,902,800	99	0	0	0	0	0	0
Evaluasi dan Penyerapan APBD Kabupaten Sragen	65.000.000	65.000.000	67.000.000	80.000.000	42.500.000	59.325.000	63,640,000	66,809,000	80,000,000	41,700,000	100	86	0	90	87	35.48	30.75
Penelaahaan SPMU dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	32.000.000	35.200.000	42.762.000	50.000.000	29.000.000	31.533.000	35,200,000	42,586,000	50,000,000	29,000,000	99	100	97	95	94	-16.26	-17.24
Penertiban Barang Milik Daerah	312.420.000	335.000.000	114.000.000	91.305.000	451.469.000	285.726.000	294,052,000	113,801,800	84,045,000	292,012,500	99	100	99	99	99	21.06	21.16
Pemeliharaan Software dan Jaringan SIM PDRD	53.675.000	208.875.000	0	0	0	53.675.000	208,875,000	0	0	0							
Pengawasan dan pengendalian pajak daerah	32.000.000	0	0	0	0	11.701.000	0	0	0	0	100	100	99	99	100	13.94	13.94

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2 (13)	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
non pajak penerangan jalan																	
Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan	21.519.000	71.075.000	200.000.000	80.705.000	30.812.500	13.390.360	65,135,000	173.427.800	72.580.000	30,812,400	83	0	0	0	0	0	0
Optimalisasi Pendapatan Pajak dan Restribusi Daerah	53.875.000	172.915.000	107.393.000	347.748.000	128.791.500	27.142.550	169,879,000	161.350.000	245.360.500	128,791,200	0	96	0	0	0	0	0
Aplikasi SIM dana bantuan Kabupaten	0	65.000.000	0	0	0	0	64.335.000	0	0	0							
Operasional Pengumpulan . Analisa Data dan Pengentryan data dana bantuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Optimalisasi penerimaan dana transfer pusat dan provinsi	0	95.000.000	0	100.000.000	68.660.000	0	84,589,203	0	96.643.494	68,325,985							
Peningkatan Manajemen persediaan/barang pakai habis	0	21.660.000	101.540.000	133.699.000	159.745.000	0	19,396,500	101.020.800	133.557.500	156,945,000							
Penyusunan perencanaan barang milik daerah	0	77.695.000	84.047.300	28.593.000	55.727.500	0	71,078,000	82.942.800	28.397.000	54,937,500							
Pemindah tanganan dan penghapusan aset	0	0	133.875.000	140.102.000	78.820.000	0	0	120.441.000	113.620.000	76,300,700							
Bimbingan teknis sistem informasi manajemen keuangan	0	0	0	256.000.000	198.881.000	0	0	0	228.349.698	198,881,000							
Monitoring dan evaluasi pajak daerah	0	0	121.100.000	190.566.000	46.983.000	0	0	117,910,000	168.853.500	39,956,500							
Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	0	0	179.700.000	425.628.000	255.368.000	0	0	161,350,000	419.053.000	246,343,000							
Validasi DPA dan DPPA	0	0	25.000.000	15.000.000	19.342.000	0	0	21,874,500	15.000.000	19,340,000							
Penyusunan Raperda Pajak	0	0	150.000.000	0	0	0	0	109,557,100	0	0							
Pemeliharaan Aset Daerah	0	0	5.000.000	66.300.000	22.743.000	0	0	4,754,000	59.800.000	22.643.000							
Sensus Barang Milik Daerah	0	0	0	474.727.000	0	0	0	0	445.884.500	0							
Pemberian biaya penyampaian SPPT bagi Tim Kecamatan.	0	0	0	1.255.545.000	1.154.015.000	0	0	0	1.203.804.900	1.153.664.482							

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Desa/Kelurahan . petugas Pemungut Tingkat Desa																	
Penyusunan Analisa Standar Biaya	0	0	75.810.000	0	0	0	0	74.847.500	0	0							
Pengundian Lunas PBB	0	0	0	321.720.000	159.220.000	0	0	0	319.940.000	157.256.800							
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0							
Penyediaan Jasa Appraisal Keuangan	0	0	0	0	48.995.000	0	0	0	0	48.995.000							
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	0	87.000.000	202.210.000	183.834.000	202.534.000	0	55.434.000	129.100.512	153.703.800	198.884.000							
Asistensi penyusunan laporan keuangan OPD	0	0	202.210.000	183.834.000	202.534.000	0	0	129.100.512	153.703.800	198.884.000							
Asistensi penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten/Kota	0	87.000.000	0	0	0	0	55.434.000	0	0	0							
Program Peningkatan dan Pelestarian Dokumen Arsip/ Daerah	0	40.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0							
Pendataan dan penatan dokumen/arsip daerah	0	40.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	98	0	100	99	0	0.9	1.44

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKPD

Telaahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT yang didalamnya dapat kami jadikan acuan sebagai faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor yang mendorong peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, dan menghasilkan beberapa telaahan dengan berdasarkan analisis SWOT seperti :

a. Kekuatan (Strength)

- Struktur organisasi dan tugas kerja yang jelas.
- Cukup tersedianya SDM
- Cukup tersedianya sarana dan prasarana.
- Cukup tersedianya aturan – aturan yang berkaitan dengan pengelolaan bidang keuangan.
- Semakin mantapnya koordinasi antar OPD.
- Prosedur dan mekanisme kerja yang jelas.
- Cukup tersedianya anggaran

b. Kelemahan (Weakness)

- Masih kurangnya pemahaman terhadap tugas fungsi.
- Kurangnya kompetitifnya sumber daya manusia yang tersedia, terutama sekali ketersediaan tenaga ahli di bidang akuntansi dan Teknologi Informasi
- Belum tersajinya sarana informasi keuangan daerah secara cepat dan tepat.
- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan – peraturan yang disebabkan berubah- ubahnya peraturan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan.
- Belum cukup tersedianya dana untuk mengikuti diklat yang berkaitan dengan keuangan.
- Sistem Informasi Manajemen belum terintegrasi antara satu dengan lainnya, terutama Sim PDRD, sehingga dalam rekonsiliasi dengan SIM-SIM yang lain sering berbeda atau terdapat selisih.
- Letak kantor yang terpisah-pisah, sehingga pelayanan terhadap wajib pajak belum terintegrasi dan berpeluang kurang optimalnya target pendapatan.

c. Peluang (Opportunities)

- Terbukanya kesempatan bagi personil untuk mengikuti pendidikan secara formal maupun informal.
- Adanya kursus yang diadakan oleh Perguruan Tinggi/Badan Diklat yang memungkinkan ditingkatkannya SDM dalam bidang keuangan.

- Kewenangan yang semakin besar bagi daerah untuk mengelola keuangan.
- Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
- Mempertahankan WTP pada tahun-tahun berikutnya.

d. Ancaman (Threats)

- Ketergantungan daerah kepada pusat dalam penyediaan anggaran daerah disebabkan pendapatan asli daerah hanya cukup untuk memenuhi sebagian kecil kebutuhan daerah.
- Adanya peraturan-peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah yang belum sejalan, sehingga membingungkan daerah.
- Munculnya kesenjangan antar daerah sebagai akibat desentralisasi anggaran yang memberikan kewenangan dan keleluasaan lebih besar dalam mengelola keuangannya.
- Rawannya kasus hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan pengelolaan keuangan daerah yang dinamis tetapi kaku yang mengakibatkan rasa tidak nyaman dalam berinovasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Permasalahan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, ada beberapa kendala, antara lain:

a) Permasalahan Eksternal :

- 1 Ketergantungan pendapatan kepada Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus), hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah hanya cukup untuk memenuhi sebagian kecil kebutuhan daerah atau dapat dikatakan kemandirian keuangan daerah sangat rendah sehingga ketergantungan dengan pusat adalah hal yang mutlak;
- 2 Adanya peraturan-peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pusat yang belum sejalan antara satu dengan lainnya sehingga membingungkan daerah dalam melaksanakan regulasi tersebut atau bahkan cenderung merugikan daerah;
- 3 Peraturan-peraturan pemerintah pusat sering terlambat diterima daerah.
- 4 Dinamika peraturan keuangan yang terus berkembang atau berubah-ubah sehingga memerlukan waktu yang lama bagi daerah dalam memahaminya;
- 5 Kurang adanya kesempatan mengikuti diklat yang berkaitan dengan keuangan;
- 6 Munculnya egoisme kedaerahan sebagai akibat desentralisasi anggaran yang memberikan kewenangan dan keleluasaan lebih besar dalam pengelolaan Keuangannya;
- 7 Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menerapkan penganggaran dan pelaporan keuangan dicatat dalam kebijakan akuntansi berbasis akrual yang didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

b) Permasalahan Internal :

1. Kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah

kurang profesional sehingga hasil dari pengelolaan keuangan kurang maksimal;

2. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan, karena sering berubah-ubahnya peraturan;
3. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi;
4. Menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun/ triwulan ke IV;
5. Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan teknologi informasi untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan maupun pendapatan;
6. Kurang optimalnya upaya intensifikasi dan kestensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah baik dari pajak maupun retribusi serta pinjaman daerah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
7. Munculnya kebijakan pengelolaan keuangan dan aset berbasis akrual.
8. Pencatatan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak kurang tertib.

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah :

2.1 Peluang Eksternal :

- a. Kewenangan yang semakin besar bagi daerah untuk mengelola keuangan yang berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama pasal 2 ayat (3), bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, Serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya tepatnya bab XI memuat tentang Keuangan Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan.
- b. Kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan secara formal maupun non formal, baik dengan biaya sendiri maupun beasiswa serta pengiriman kursus sesuai kebutuhan.
- c. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi dalam satu program.

2.2. Peluang Internal :

- a. Terdapatnya struktur organisasi dan tugas kerja yang jelas;
- b. Kecukupan tersedianya sarana dan prasarana kerja;
- c. Prosedur dan mekanisme kerja didasari dengan payung hukum yang jelas;
- d. Jumlah personil memadai;
- e. Didukung oleh anggaran yang memadai.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 adalah: **“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”**.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan.
4. Menangani kemiskinan memperluas kesempatan kerja.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Berdasarkan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Sragen berada pada Misi yang ke 2 yaitu : **“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi ”**. Adapun variabel yang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 adalah :

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam “Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

- (Predikat SAKIP), Indeks Inovasi Daerah, Indeks Persepsi Anti Korupsi, Indeks Sistem Merit, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.
- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Teknologi Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks SPBE, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dan Indeks Pengawasan Kearsipan.
 - c. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah persentase penurunan konflik sosial.
 - d. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Resiko Bencana (IRB).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis Kementerian Keuangan ada kesesuaian dengan tupoksi dari BPKPD terutama terkait dengan Keuangan Daerah. Beberapa sasaran yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra BPKPD Kabupaten Sragen, yaitu terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD. Adapun arah kebijakannya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan mencakup pajak daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah dan penyertaan modal daerah serta pinjaman dan obligasi daerah;
3. Melaksanakan koordinasi, penyiapan data dan informasi keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam berkontribusi pencapaian visi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode yaitu dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera antara lain akan dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan maka diperlukan sejumlah dana yang salah satunya dihimpun melalui pajak dan retribusi daerah. Upaya peningkatan PAD tersebut antara lain adalah bagian

tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.

Faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong pelayanan BPKPD Kabupaten Sragen yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran, tantangan pengelolaan aset yang rumit, tantangan pengelolaan keuangan daerah yang sangat terbatas dengan belanja aparatur yang sangat besar sangat mempengaruhi pembangunan secara makro dilihat dari sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, yang merupakan pilar-pilar utama pembangunan di Kabupaten Sragen. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Provinsi Jawa Tengah. Potensi pendapatan yang sangat minim sehingga diperlukan inovasi-inovasi yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh peningkatan pendapatan yang signifikan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :

- a) Banyaknya aset-aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten yang belum mempunyai kekuatan hukum, sehingga akan sangat rawan terhadap penyalahgunaan ataupun penyerobotan oleh masyarakat sehingga nantinya akan berbeda dengan RTRW Kab. Sragen dan KLHS yang telah tersusun.
- b) Keterbatasan anggaran, atau keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi maupun kontrol terhadap pelaksanaan RTRW dan KLHS.
- c) Target pendapatan yang selalu naik akan mengakibatkan penarikan retribusi secara acak, hal ini akan menimbulkan kenaikan jumlah PKL-PKL yang ilegal karena sudah ditarik retribusi, padahal kenyataannya PKL-PKL tersebut tidak sesuai RTRW dan KLHS, sehingga perlu dipetakan potensi-potensi peningkatannya dengan mempertimbangkan RTRW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Tuntutan Desentralisasi Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah menghendaki prinsip Pemerintahan yang akuntabel dan transparan, dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan yang akan mempengaruhi permasalahan dalam rangka perwujudan fungsi pelayanan itu sendiri, sehingga kedepannya bisa diambil suatu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul.

Hal tersebut dapat tercapai apabila terpenuhi syarat – syarat yang merupakan isu strategis dalam bidang keuangan antara lain :

- 1 Meningkatnya koordinasi dalam penyusunan anggaran maupun target pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah yang efektif dan efisien;
- 2 Tersedianya tenaga yang profesional dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga mampu menciptakan sebuah konsep anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan tarnsparan;
- 3 Semakin mantapnya Struktur Organisasi dan Prosedur/Mekanisme Kerja dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 4 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan;
- 5 Terwujudnya pengelolaan kas daerah yang akuntabel dan transparan;
- 6 Meningkatnya pendapatan daerah guna mendukung pembangunan melalui koordinasi;
- 7 Terlaksananya pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi sehingga diharapkan mampu menciptakan sebuah sistem yang akuntabel dan transparan.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Misi yang telah dirumuskan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen mengidentifikasi tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen secara umum adalah :

“Meningkatkan persentase PAD serta pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien”.

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dalam mendukung sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen tahun 2021–2026 adalah :

- 1. Meningkatkan pendapatan asli daerah.***
- 2. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.***

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan persentase PAD serta pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien	Tingkat kemandirin keuangan daerah	16,28%	16,67%	17,06%	17,46%	17,06%
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.1	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	14,36%	2,69%	2,72%	2,75%	2,78%
1.2	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yang baik (%)	100%	100%	100%	100%	100%

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi dan Kebijakan OPD

5.1.1 Strategi :

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.
2. Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah melalui Pemantapan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Sragen dalam mengimplementasikan dan mewujudkan tujuan dan sasarannya mengambil kebijakan yang diambil sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan PAD.
2. Meningkatkan ketertiban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB. VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan diterapkan untuk kurun waktu 2021 – 2026 harus tetap sesuai dengan aturan yang ada di atasnya, maka Program – Program Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen tetap mengacu pada Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sampai saat ini masih berlaku, Program-program yang disusun tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**A. Indikator Kinerja****1. Indikator Keluaran (Output)**

Indikator keluaran (output) kinerja dari Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat daerah dalam satu Tahun (%)

a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah, adalah :
Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu..

b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- 1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Jumlah Dokumen RKA-SKPD
- 3) Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD
- 4) Jumlah Dokumen DPA-SKPD.
- 5) Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- 6) Jumlah Dokumen penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
- 7) Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, adalah :
- Jumlah Presentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu.
- b. Indikator Hasil (Outcome)
- Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :
- 1) Jumlah bulan dalam penyediaan gaji dan Tunjangan ASN di BPKPD Sragen.
 - 2) Jumlah dokumen pelaksana kegiatan dalam satu tahun.
 - 3) Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.
 - 4) Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - 5) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan.
 - 6) Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan.
 - 7) Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun.
 - 8) Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
- c. Sub Kegiatan
- Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

4. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, adalah :

Jumlah Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun.

b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

- 1) Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah.
- 2) Jumlah yang disimpan barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan.
- 3) Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
- 4) Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah.
- 5) Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah.
- 6) Jumlah Dokumen barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar.
- 7) Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang dikelola dan administrasi dengan benar.

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

5. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, adalah :

Jumlah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan

b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah :

- 1) Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan.
- 2) Jumlah Stel pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan.
- 3) Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian.
- 4) Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg.
- 5) Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.
- 6) Jumlah pegawai yang pensiun yang terfasilitasi.
- 7) Jumlah pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas yang terfasilitasi.
- 8) Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pindah tugas.
- 9) Jumlah Pengiriman peserta pelatihan.
- 10) Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- 11) Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah :

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- 6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- 7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas.
- 8) Pemindahan Tugas ASN.
- 9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

6. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, adalah :

Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan.

b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

- 1) Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
- 2) Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan ATK kantor.
- 3) Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersediakan.
- 4) Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat.
- 5) Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 6) Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 7) Jumlah Bulan dalam penyediaan Bahan Materai.
- 8) Jumlah Bulan dalam memfasilitasi Kunjungan Tamu.
- 9) Jumlah bulan tersedianya biaya perjalanan dinas.
- 10) Jumlah bulan penataan dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah.
- 11) Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun.

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Penyediaan Bahan/Material.
- 8) Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

7. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, adalah :

Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun.

b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- 1) Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan.
- 2) Jumlah kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang diadakan.
- 3) Jumlah mebel yang diadakan.
- 4) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan
- 5) Jumlah Gedung Kantor yang terbangun.
- 6) Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan.
- 7) Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan.

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 3) Pengadaan Mebel.
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

8. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adalah :

Jumlah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan.

b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- 1) Jumlah Bulan dalam surat Menyurat .
- 2) Jumlah bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- 3) Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.

- 4) Jumlah bulan dalam pembayaran Jasa kebersihan Kantor dan peralatan alat kerja kantor.

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

9. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adalah :
Jumlah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang disusun sesuai ketentuan.

b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- 1) Jumlah kendaraan dinas yang, terpelihara dan terbayar pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun.
- 2) Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya.
- 3) Jumlah Bulan dalam pemenuhan perawatan gedung kantor.
- 4) Jumlah bulan dalam pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Indikator Kinerja

1. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran (output) kinerja dari Program pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

Persentase Keuangan Daerah yang dikelola sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP).

2. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, adalah :

Jumlah Presentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun sesuai aturan.

- b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah :

- 1) Jumlah Dokuman KUA PPAS.
- 2) Jumlah Dokuman Perubahan KUA PPAS.
- 3) Jumlah SKPD Penerima RKA dan DPPA.
- 4) Jumlah SKPD Penerima RKA dan DPPA.
- 5) Jumlah Dokumen Perda tentang APBD dan Nota Keuangan, Jumlah Dokumen Perbub tentang penjabaran APBD.
- 6) Jumlah Dokumen Perda tentang APBD dan Nota Keuangan, Jumlah Dokumen Perbub tentang penjabaran APBD.
- 7) Jumlah SKPD Penerima Edaran tentang Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Jumlah SKPD yang Mengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- 9) Jumlah SKPD yang Mengelola Belanja Daerah.
- 10) Jumlah SKPD Penerima Edaran tentang Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan.
- 11) Jumlah SKPD Peserta Bimtek Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten yang transparan dan akuntabel.

- c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
- 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
- 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

- 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
 - 9) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
 - 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
 - 11).Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, adalah :
- Jumlah Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang dikerjakan.
- b. Indikator Hasil (Outcome)
- Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah adalah :
- 1) Jumlah Dokumen Kas Umum Daerah Dalam Setahun.
 - 2) Jumlah Dokumen SP2D dan SPD dalam setahun.
 - 3) Jumlah Dokumen Pencairan Laporan Dana Transfer, Pusat dan Provinsi dalam Setahun.
 - 4) Jumlah Dokumen SPD gaji, TPP, SKPP, Belanja Transfer dalam setahun.
 - 5) Jumlah Dokumen Utang dan Penempatan Kas Daerah.
 - 6) Jumlah bulan Penyerapan APBD dan Jumlah dokumen Rekon.
 - 7) Jumlah Buku Penatausahaan dan Bimbingan Teknis Pentausahaan Keuangan
- c. Sub Kegiatan
- Sub Kegiatan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah adalah :
- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

- 5) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
 - 6) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
 - 7) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
4. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, adalah :
Jumlah Presentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun.
- b. Indikator Hasil (Outcome)
Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah :
- 1) Jumlah peserta rekonsiliasi laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas.
 - 2) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD.
 - 3) Jumlah buku Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran.
 - 4) Jumlah Laporan Keuangan pemerintah Daerah.
 - 5) Jumlah buku Perda Pertanggungjawaban APBD dan buku Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
 - 6) Jumlah aplikasi Analisis Laporan Pertanggungjawaban APBD.
 - 7) Jumlah dokumen Perbup kebijakan Akuntansi dan Panduan teknis Operasional.
 - 8) Jumlah Perbup Sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan Keuangan daerah.
 - 9) Jumlah Peserta pembinaan akuntansi, palporan dan pertanggungkawaban Pemerintah / Kabupaten/Kota.
- c. Sub Kegiatan
Sub Kegiatan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah :
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.

- 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - 6) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - 7) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - 8) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 9) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah :
Jumlah Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun.
- b. Indikator Hasil (Outcome)
Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
- 1) Jumlah bulan Pinjaman Keuangan Daerah .
 - 2) Jumlah lokasi penyaluran Dana Desa dan pembangunan sarana prasarana desa.
 - 3) Jumlah bulan pengelolaan dana darurat dan mendesak.
- c. Sub Kegiatan
Sub Kegiatan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
- 1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah.
 - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
 - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
6. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, adalah :
Jumlah Persentase pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
- b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah adalah :

- 1) Jumlah bulan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan daerah Bidang Keuangan .
- 2) Jumlah OPD yang melakukan pembinaan sistem informasi Pemerintah Bidang keuangan.

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

- 1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
- 2) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

A. Indikator Kinerja

1. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran (output) kinerja dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :

Presentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik

2. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, adalah :

Jumlah Presentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun

b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :

- 1) Jumlah Dokumen Pedoman Standart Harga Satuan Barang yang disusun.
- 2) Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD.
- 3) Jumlah Dokumen Pencatatan BMD yang dikelola dan teradministrasi dengan baik dan benar.
- 4) Jumlah SKPD yang dilakukan data base inventarisasi barang milik daerah.
- 5) Jumlah kendaraan dinas yang terasuransikan.
- 6) Jumlah Laporan TGR semesteran dan Jumlah SKPD yang dilakukan penghapusan aset.
- 7) Jumlah sertifikat Tanah Milik PemKab yang tersertifikatkan.

- 8) Jumlah Laporan SKPD yang melakukan laporan Inventarisasi BMD.
- 9) Jumlah Laporan tahunan Barang Milik Daerah.
- 10) Jumlah Pengurus Barang Yang melakukan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :

- 1) Penyusunan Standar Harga.
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- 4) Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- 5) Pengamanan Barang Milik Daerah.
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- 8) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- 9) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- 10) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

A. Indikator Kinerja

1. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran (output) kinerja dari Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

Jumlah Presentase pengelolaan Pendapatan Daerah

2. a. Indikator Hasil (outcome) Kinerja dari Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, adalah :

Jumlah Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah yang dicapai.

b. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil (outcome) Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah adalah:

- 1) Jumlah wajib pajak dan obyek pajak yang terdaftar dan terlayani.
- 2) Jumlah Lokasi penyuluhan dan penyeberluasan kebijakan Pajak.
- 3) Jumlah aplikasi Pajak Daerah yang terpelihara dan peralatan hardware software komputer.
- 4) Jumlah obyek pajak baru yang terdata dan penyesuaian tarif obyek pajak lama.

- 5) Jumlah data wajib pajak PBB yang terpelihara.
- 6) Jumlah wajib pajak yang dilakukan penilaian PBB dan BPHTB.
- 7) Jumlah SPPT yang ditetapkan.
- 8) Jumlah lokasi pendistribusian sarana & prasarana pemungutan pajak daerah dan jumlah lokasi pelaksanaan Bulan Panutan PBB.
- 9) Jumlah bulan pencetakan SPPT PBB dan biaya penyampaian SPPT PBB.
- 10) Jumlah Kecamatan yang dilakukan kegiatan penagihan pajak daerah.
- 11) Jumlah lokasi yang dilakukan Monev dan Jml Petugas pemungut yg lunas tepat waktu.

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah adalah :

- 1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah.
- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
- 4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- 5) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
- 6) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 7) Penetapan Wajib Pajak Daerah.
- 8) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
- 9) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
- 10) Penagihan Pajak Daerah.
- 11) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPKPD Kabupaten Sragen

Kode					Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
1					2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN													
5	2				KEUANGAN				399.183.721.036		434.056.564.430		432.771.788.430		432.726.156.430		432.792.160.430	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat daerah dalam satu Tahun	%	37.938.860.036	100	40.168.955.000	100	39.211.925.000	100	38.624.492.000	100	37.892.992.000	100
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	31.504.000	18	105.000.000	22	105.000.000	22	105.000.000	22	105.000.000	22
5	2	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8.728.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2
5	2	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	8.978.000	2	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1
5	2	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1
5	2	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6.899.000	2	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1
5	2	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1
5	2	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6.899.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12

Kode					Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5	2	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	14.816.519.866	100	16.251.388.164	22	15.201.083.164	22	14.302.150.164	22	14.605.150.164	22
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14.778.751.866	83/12	16.199.388.164	85/12	15.149.083.164	85/12	14.250.150.164	85/12	14.553.150.164	85/12
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			17.000.000	5	17.000.000	5	17.000.000	5	17.000.000	5
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	22.325.000	5	7.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	5
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15.443.000	5	7.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	5
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen			7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		100	40.000.000	9	41.000.000	9	41.500.000	9	41.500.000	9
5	2	1	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2
5	2	1	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			7.000.000	1	8.000.000	1	8.500.000	1	8.500.000	1
5	2	1	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1

Kode					Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5	2	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2
5	2	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
5	2	1	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	15.000.000	3	193.600.000	214	195.600.000	220	195.600.000	220	197.600.000	235
5	2	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			150.000.000	110	150.000.000	110	150.000.000	110	150.000.000	110
5	2	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1
5	2	1	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10
5	2	1	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15.000.000	3	11.600.000	3	11.600.000	3	11.600.000	3	11.600.000	3
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			10.000.000	89	12.000.000	95	12.000.000	95	14.000.000	110
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket / Dokumen	584.528.050	2804	472.963.700	7	478.238.700	6	489.238.700	7	484.238.700	6
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8.695.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	290.361.000	153	183.663.950	1	183.663.950	1	183.663.950	1	183.663.950	1
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			5.000.000	1			5.000.000	1		
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	127.492.500	2648	75.360.000	1	75.360.000	1	75.360.000	1	75.360.000	1

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24.499.550	1	24.499.750	1	24.499.750	1	24.499.750	1	24.499.750	1
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2.400.000	1	2.160.000	1	2.160.000	1	2.160.000	1	2.160.000	1
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			2.200.000	1	2.475.000	1	2.475.000	1	2.475.000	1
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			20.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	131.080.000	8	131.080.000	8	131.080.000	8	131.080.000	8	131.080.000	8
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			14.000.000	800	14.000.000	800	14.000.000	800	14.000.000	800
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7
5 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun	Unit		1	605.000.000	28	690.000.000	7	990.000.000	8	690.000.000	7
5 2 1 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			450.000.000	1	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2
5 2 1 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit							300.000.000	1		
5 2 1 2.07 05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			45.000.000	20						
5 2 1 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			20.000.000	2						
5 2 1 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit										
5 2 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3
5 2 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2

Kode				Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	21.939.296.000	3448	21.837.848.546	3450	21.837.848.546	3450	21.837.848.546	3450	21.837.848.546	3450
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.465.000	3.465.000	3400	3.465.000	3400	3.465.000	3400	3.465.000	3400
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	21.801.200.000	21.649.178.106	36	21.649.178.106	36	21.649.178.106	36	21.649.178.106	36
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	134.631.000	135.205.440	12	135.205.440	12	135.205.440	12	135.205.440	12
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang disusun sesuai ketentuan	Unit	552.012.120	663.154.590	31	663.154.590	31	663.154.590	31	663.154.590	31
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	442.039.000	372.345.000	11	372.345.000	11	372.345.000	11	372.345.000	11
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	109.973.120	150.809.590	1	150.809.590	1	150.809.590	1	150.809.590	1
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit		30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5

Kode					Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Presentase OPD yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	%	356.859.113.000	100	386.122.433.000	100	386.125.412.000	100	386.614.438.000	100	386.888.167.000	100
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun sesuai aturan	Dokumen	1.209.102.921	124	1.694.000.000	216	1.713.000.000	263	1.731.000.000	263	1.749.000.000	263
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	80.000.000	2	108.000.000	2	108.000.000	2	110.000.000	2	112.000.000	2
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	65.908.000	2	78.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	82.000.000	2
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	29.799.000	2	65.000.000	2	66.000.000	2	68.000.000	2	70.000.000	2
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	31.155.000	2	46.000.000	2	46.000.000	2	48.000.000	2	49.000.000	2
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen			7.500.000	47	7.500.000	47	7.500.000	47	7.500.000	47
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen			7.500.000	47	7.500.000	47	7.500.000	47	7.500.000	47
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	700.000.000	3	835.000.000	3	840.000.000	3	842.000.000	3	842.000.000	3
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	199.879.021	3	373.000.000	3	375.000.000	3	376.000.000	3	376.000.000	3
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	51.431.900	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	57.000.000	2
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	10.500.000	13	27.000.000	12	29.000.000	12	31.000.000	12	33.000.000	12
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	29.500.000	48	27.000.000	47	29.000.000	47	31.000.000	47	33.000.000	47
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen			5.000.000		5.000.000	47	5.000.000	47	5.000.000	47
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	10.930.000	47	60.000.000	47	65.000.000	47	70.000.000	47	75.000.000	47

Kode					Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang dikerjakan	Dokumen/ Laporan	519.484.500	12.690	1.153.500.000	13.343	977.000.000	13.848	1.301.000.000	14.353	1.397.000.000	14.863
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	60.000.000	36	82.500.000	40	90.750.000	45	100.000.000	50	110.000.000	60
5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan			5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	56.484.500	9500	104.000.000	10.000	114.000.000	10.500	125.000.000	11.000	137.000.000	11500
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen		1	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	80.000.000	80	110.000.000	80	121.000.000	80	133.000.000	80	146.000.000	80
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama, dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen		10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Laporan	167.000.000	3.000	235.000.000	3.000	250.000.000	3.000	260.000.000	3.000	286.000.000	3000

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	36.000.000	4	69.000.000	4	73.000.000	4	78.000.000	4	83.000.000	4
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	100.000.000	47	253.000.000	47	278.000.000	47	305.000.000	47	335.000.000	47
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang			250.000.000	147	250.000.000	147	250.000.000	147	250.000.000	147
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Presentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	%	832.678.850	100	1.165.683.180	100	1.287.751.498	100	1.420.026.648	100	1.563.529.313	100
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	22.000.100	67	24.200.110	67	26.620.121	67	29.282.133	67	32.210.346	67
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	56.426.000	50	62.068.600	50	68.275.460	50	75.103.006	50	82.613.307	50
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	Laporan	25.009.000	64	27.509.900	64	30.260.890	64	33.286.979	64	36.615.677	64
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	80.614.500	7	88.675.950	7	97.543.545	7	107.297.900	7	118.027.689	7

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	262.853.200	150	289.138.520	150	318.052.372	150	349.857.609	150	384.843.370	150
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen hasil Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen			25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen			25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	71.398.500	1	75.075.000	1	82.582.500	1	90.840.750	1	99.924.825	1
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	113.141.000	2	124.455.100	2	136.900.610	2	150.590.671	2	165.649.738	2
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	14.928.350	1	102.025.000	1	112.227.500	1	123.450.250	1	135.795.275	1
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten /Kota	Orang	186.308.200	130	227.535.000	130	250.288.500	130	275.317.350	130	302.849.085	130
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina	Lembaga			60.000.000	30	65.000.000	30	70.000.000	30	75.000.000	30
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota	Laporan			35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	Laporan	354.188.588.229	14	381.809.249.820	4	381.822.660.502	4	381.837.411.352	4	381.853.637.687	4

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5 02 02 2.04 03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	2.617.843.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	340.570.745.229	12	334.784.249.820	1	334.797.660.502	1	334.812.411.352	1	334.828.637.687	1
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	11.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Laporan			37.000.000.000	1	37.000.000.000	1	37.000.000.000	1	37.000.000.000	1
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen/Jumlah Orang dalam pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Dokumen/ Orang	109.258.500	12/70	300.000.000	154/70	325.000.000	154/70	325.000.000	154/70	325.000.000	154/70
5 02 02 2.05 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen			200.000.000	142	225.000.000	142	225.000.000	142	225.000.000	142
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	48.249.500	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	61.009.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Presentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah yang dengan baik	%	963.860.000	100	1.736.542.000	100	1.374.542.000	100	1.317.042.000	100	1.691.542.000	100
5 2 3 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Presentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	%	963.860.000	100	1.736.542.000	100	1.374.542.000	100	1.317.042.000	100	1.691.542.000	100
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	115.061.000	1	194.093.000	1	199.093.000	1	204.093.000	1	209.093.000	1
5 02 03 2.02 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen					60.000.000	1				
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	24.513.000	2	59.774.000	2	64.774.000	2	69.774.000	2	74.774.000	2

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	56.336.000	4	127.675.000	4	102.675.000	4	107.675.000	4	112.675.000	4
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	131.462.000	47	165.000.000	47	165.000.000	47	140.000.000	47	170.000.000	47
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	400.000.000	2	490.000.000	2	425.000.000	2	300.000.000	2	400.000.000	2
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	13.250.000	2								
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	50.000.000	2	163.000.000	2	173.000.000	2	183.000.000	2	190.000.000	2
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	30.000.000	53	130.000.000	53	120.000.000	53	120.000.000	53	120.000.000	53
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	22.400.000	2	57.000.000	2	65.000.000	2	42.500.000	2	65.000.000	2
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	120.838.000	200	350.000.000	200			150.000.000	200	350.000.000	200
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan realisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	%	3.421.888.000	100	6.028.634.430	100	6.059.909.430	100	6.170.184.430	100	6.319.459.430	100
5 2 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Presentase pengelolaan Pendapatan Daerah yang dicapai	%	3.421.888.000	100	6.028.634.430	100	6.059.909.430	100	6.170.184.430	100	6.319.459.430	100
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	94.105.000	1	246.000.000	1	248.000.000	1	250.000.000	1	253.000.000	1
5 02 04 2.02 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen			80.000.000	10						
5 02 04 2.03 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan			60.000.000	1	60.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	224.310.000	1	668.000.000	1	670.000.000	1	672.000.000	1	674.000.000	1

Kode					Uraian/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Indikator/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran Tahun 2022	Target Plafon Anggaran 2022	Anggaran Tahun 2023	Target Plafon Anggaran 2023	Anggaran Tahun 2024	Target Plafon Anggaran 2024	Anggaran Tahun 2025	Target Plafon Anggaran 2025	Plafon Anggaran Tahun 2026	Target Plafon Anggaran 2026
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	103.062.000	1	212.000.000	1	214.000.000	1	216.000.000	1	218.000.000	1
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	23.101.000	1	89.450.000	1	91.450.000	1	93.450.000	1	95.450.000	1
5	02	04	2.02	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah obyek pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak			39.000.000	125	40.000.000	128	41.000.000	130	43.000.000	132
5	02	04	2.03	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1.373.604.000	1	1.245.000.000	1	1.248.000.000	1	1.250.000.000	1	1.254.000.000	1
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	199.623.000	20	269.934.500	20	279.209.500	20	288.484.500	20	297.759.500	20
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen			1.460.000.000	1	1.465.000.000	1	1.470.000.000	1	1.475.000.000	1
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	360.658.000	20	399.249.930	20	409.249.930	20	419.249.930	20	429.249.930	20
5	02	04	2.02	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen			10.000.000	50	15.000.000	50	20.000.000	50	30.000.000	50
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1.043.425.000	4	1.200.000.000	4	1.270.000.000	4	1.370.000.000	4	1.470.000.000	120
5	02	04	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan			50.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	14

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator-indikator kinerja kegiatan yang di rencanakan meliputi :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen melalui : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen melalui : Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN.
- c. Administrasi Kepegawian dan Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen melalui : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
- d. Administrasi Umum perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, melalui : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- e. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, melalui: penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum.
- f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, melalui: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya.
- g. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, meliputi: Koordinasi dan penyusunan KUA-PPAS, Koordinasi, penyusunan, perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD, Koordinasi regulasi kebijakan bidang anggaran, Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- h. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, meliputi: Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah, Penyiapan, pelaksanaan dan penerbitan anggaran Kas dan SPD. Koordinasi fasilitasi asistensi supervisi monitoring dana perimbangan

dan dana transfer lainnya, Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan, aliran kas, pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK), Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi Kas. Rekonsiliasi Data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan atas SP2D dengan instansi terkait. Penyusunan petunjuk Teknis Administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.

- i. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, meliputi: Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban ekuasi pendapatan belanja, pembiayaan pendapatan LO dan beban, Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran, Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah, penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota.
- j. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, meliputi: analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah, Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, dan pengelolaan dana darurat dan mendesak.
- k. Pengelolaan Data dan Implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah, meliputi: Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah, pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota.
- l. Pengelolaan barang Milik Daerah, meliputi: penyusunan standar harga, penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah, pengamanan barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, penyusunan laporan barang milik daerah, pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten/Kota.
- m. Pengelolaan Pendapatan Daerah, meliputi: Perencanaan pengelolaan pajak daerah, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan berbasis data pajak daerah, penetapan wajib pajak daerah, pelayanan konsultasi pajak daerah, penagihan pajak daerah, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Urusan	OPD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan PD/IKU OPD	FORMULASI	Kondisi Awal		TARGET						Sasaran OPD	Indikator sasaran PD	FORMULASI	Kondisi Awal		TARGET						Program (Sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program	FORMULASI	Kondisi Awal		TARGET					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
12	Kuangan	BPKPD	Meningkatkan persentase PAD serta pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Realisasi PAD/Total Pendapatan Daerah dikalikan 100%	17,83%	14,62%	16,28%	16,67%	17,06%	17,46%	17,86%	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun berkenaan (n) dikurangi jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (n-1) dibagi jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun lalu (n-1) dikali 100	7,09%	-22,02%	14,36%	2,69%	2,72%	2,75%	2,78%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	(Realisasi pajak daerah tahun n dikurangi Realisasi pajak daerah tahun n-1/Realisasi pajak daerah tahun n-1 dikalikan 100%)	11,48%	-32,64%	19,89%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%			
																								Persentase Kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah	(Realisasi retribusi daerah tahun n dikurangi Realisasi retribusi daerah tahun n-1/Realisasi retribusi daerah tahun n-1 dikalikan 100%)	-6,58%	-3,28%	30,74%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%			
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yang baik (%)	{Laporan keuangan lengkap (40%) + bukti dukung yang dibutuhkan lengkap (30%) + standar umum yang telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja (15%) + Laporan keuangan sesuai prinsip yang berlaku umum (15%)}	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	Jumlah OPD yang menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)/jumlah OPD kali 100 %	80%	80%	80%	85%	90%	90%	98%			
																								PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah yang dengan baik	Jumlah OPD yang tertib data Pengelolaan Barang Milik Daerah dibagi Jumlah OPD di Kabupaten Sragen kali 100	80%	80%	80%	85%	90%	90%	98%		

BAB. VIII**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arah dalam penyelenggaraan organisasi satuan kerja yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan termasuk pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sragen.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (2021-2026) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan untuk mencapai masyarakat sehat sejahtera dan mandiri.

Sragen, 16 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN



DWIYANTO, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770310 199511 1 001

Lampiran Formulasi Indikator Kinerja OPD

No	Nama Indikator	Formulasi	Keterangan
1.	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Realisasi PAD/Total Pendapatan Daerah dikalikan 100%	
2.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	
3.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun berkenaan (n) dikurangi jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (n-1) dibagi jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun lalu (n-1) dikali 100	
4.	Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yang baik (%)	Laporan keuangan lengkap (40%) + bukti dukung yang dibutuhkan lengkap (30%) + standar umum yang telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja (15%) + Laporan keuangan sesuai prinsip yang berlaku umum (15%)	
5.	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi pajak daerah tahun n dikurangi Realisasi pajak daerah tahun n-1/Realisasi pajak daerah tahun n-1 dikalikan 100%	
6.	Persentase Kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi retribusi daerah tahun n dikurangi Realisasi retribusi daerah tahun n-1/Realisasi retribusi daerah tahun n-1 dikalikan 100%	
7.	Persentase OPD yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	Jumlah OPD yang menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP/jumlah OPD kali 100 %	
8.	Persentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah yang dengan baik	Jumlah OPD yang tertib data Pengelolaan Barang Milik Daerah dibagi Jumlah OPD di Kabupaten Sragen kali 100	

Lampiran Formulasi Kegiatan OPD

No	Nama Indikator	Formulasi	Keterangan
1.	Presentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Nama Indikator	Formulasi	Keterangan
6.	Presentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun sesuai aturan	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
7.	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang dikerjakan	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
8.	Presentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
9.	Presentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
10.	Presentase pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
11.	Presentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
12.	Presentase pengelolaan Pendapatan Daerah yang dicapai	Jumlah anggaran tahun n/100 dikali 100 persen	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah